



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER



PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini disusun sebagai implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tana Paser, 18 Agustus 2023

 **SEKRETARIS DPRD,**

M. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	18
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran	23
3.2 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023	24
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	52
4.2 Rencana Tindak Lanjut	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	19
Tabel 3.1	Penyesuaian Target Tujuan/Sasaran Perubahan Renja 2023	23
Tabel 3.2	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Paser	25
Tabel 3.3	Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser	39
Tabel 3.4	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPД Kabupaten Paser Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam satu tahun;

2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Sekretariat DPRD, proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II.

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2023 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2023

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2023 yang disertai perubahan target

3.2. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
			K	RP	Triwulan-I		Triwulan-II		K	RP	K	RP		
					(5)	(6)	(7)	(8)						
4.02.0.00.0.00.00.	Sekretariat DPRD			17,23	12.641.710.990	17,15	16.135.037.074	34,38	28.776.748.064	34,38	58,4	SR	R	
4.02.0.00.0.00.00.	Sekretariat DPRD			17,23	12.641.710.990	17,15	16.135.037.074	34,38	28.776.748.064	34,38	58,4	SR	R	
4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	Indeks	16	7.575.437.097	18	10.313.220.597	34	17.888.657.694	47,22	53,52	SR	R
4.02.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	70	Nilai (B)	0	22.905.468	63,92	-	22.905.468	91,31	20,7	ST	SR	
4.02.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	0	16.189.912	0	-	16.189.912	0	26,3	SR	SR	
4.02.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	dokumen	1	-	1	-	-	40	0	SR	SR	

4.02.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja SKPD	3	laporan	46.319.590	1	6.715.556	0	-	1	6.715.556	33,33	14,5	SR	SR
4.02.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja SKPD	100	%	6.371.007.641	25	573.664.848	25	2.624.142.257	50	3.197.807.105	50	50,19	SR	SR
4.02.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja SKPD	540	Orang/12 bulan	6.316.204.461	135	556.627.541	135	2.624.142.257	270	3.180.769.798	50	50,36	SR	SR
4.02.001.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kinerja SKPD	12	dokumen	24.844.420	3	7.997.307	3	-	6	7.997.307	50	32,19	SR	SR
4.02.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja SKPD	2	dokumen	29.958.760	0	9.040.000	0	-	0	9.040.000	0	30,17	SR	SR
4.02.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kinerja SKPD	100	%	104.844.000	25	212.764.212	25	11.500.000	50	224.264.212	50	213,9	SR	ST
4.02.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja SKPD	0	paket	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kinerja SKPD	20	orang	104.844.000	20	212.764.212	0	11.500.000	20	224.264.212	100	213,9	ST	ST
4.02.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja SKPD	100	%	921.415.087	25	109.780.473	25	358.620.889	50	468.401.362	50	50,84	SR	SR

4.02.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	administrasi perkantoran	2	jumlah Paket	31.000.640	1	14.971.000	0	-	1	14.971.000	50	48,29	SR	SR
4.02.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10	jumlah Paket	388.019.510	1	16.044.580	4	150.923.782	5	166.968.362	50	43,03	SR	SR
4.02.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7	jumlah Paket	105.720.285	1	18.461.000	0	35.607.600	1	54.068.600	14,29	51,14	SR	R
4.02.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3	jumlah Paket	36.003.000	1	8.460.000	0	9.225.000	1	17.685.000	33,33	49,12	SR	SR
4.02.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4	jumlah Dokumen	56.300.000	0	-	0	35.700.000	0	35.700.000	0	63,41	SR	R
4.02.001.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	jumlah Laporan	32.485.000	1	6.350.000	3	6.685.000	4	13.035.000	33,33	40,13	SR	SR
4.02.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	jumlah Laporan	236.804.000	9	43.193.893	10	108.979.507	19	152.173.400	42,22	64,26	SR	R
4.02.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8	jumlah Dokumen	35.082.652	3	2.300.000	2	11.500.000	5	13.800.000	62,5	39,34	R	SR
4.02.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	233.560.411	25	24.676.419	25	235.953.373	50	260.629.792	50	111,59	SR	ST

4.02.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
4.02.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34	unit	233.560.411	2	24.676.419	18	235.953.373	20	58,82	111,59	58,82	260.629.792	58,82	111,59	R	ST
4.02.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100	%	1.508.361.832	25	304.425.191	25	160.121.175	50	50	30,8	50	464.546.366	50	30,8	SR	SR
4.02.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	588.113.200	3	157.072.693	3	157.907.607	6	50	53,56	50	314.980.300	50	53,56	SR	R
4.02.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	920.248.632	3	147.352.498	3	2.213.568	6	50	16,25	50	149.566.066	50	16,25	SR	SR
4.02.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100	%	1.314.536.802	25	118.748.900	25	263.422.273	50	50	29,07	50	382.171.173	50	29,07	SR	SR
4.02.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	unit	358.399.204	0	16.777.400	1	36.759.973	1	25	14,94	25	53.537.373	25	14,94	SR	SR
4.02.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3	unit	154.489.899	0	2.137.800	0	-	0	0	1,38	0	2.137.800	0	1,38	SR	SR

4.02.001.2.16.002	Fasilitasi Fraksi DPRD	3	laporan	53.352.074	1	5.400.000	0	4.275.000	1	9.675.000	33,33	18,13	SR	SR
4.02.001.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20	laporan	417.667.000	5	63.675.000	2	50.750.000	7	114.425.000	35	27,4	SR	SR
4.02.001.2.16.004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	36	paket	573.173.680	9	134.848.560	9	303.287.960	18	438.136.520	50	76,44	SR	T
4.02.002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	%	15.850.389.504	0	5.066.273.893	0	5.821.816.477	0	10.888.090.370	0	68,69	SR	S
		6	dok		0		0		0		0		SR	
		100	%		0		33,3		33,3		33,3		SR	
4.02.002.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10	Dok Perda	2.577.162.451	0	561.871.226	0	1.289.543.184	0	1.851.414.410	0	71,84	SR	S
4.02.002.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen	9.259.300	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.01.002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	dokumen	1.762.658.451	0	479.233.662	0	1.151.515.757	0	1.630.749.419	0	92,52	SR	ST
4.02.002.2.01.003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3	Dokumen	335.399.650	0	60.879.840	0	89.240.281	0	150.120.121	0	44,76	SR	SR

4.02.002.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	Dokumen	460.585.600	0	21.757.724	0	48.787.146	0	70.544.870	0	15,32	SR	SR
4.02.002.2.01.005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	dokumen	9.259.450	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5	Rekomendasi	573.757.000	0	14.040.000	0	268.932.363	0	282.972.363	0	49,32	SR	SR
4.02.002.2.02.001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokumen	84.595.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	31.140.500	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.02.003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	147.235.000	0	14.040.000	0	35.100.000	0	49.140.000	0	33,38	SR	SR
4.02.002.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	30.450.500	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	280.336.000	0	-	0	233.832.363	0	233.832.363	0	83,41	SR	T
4.02.002.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	20	Rekomendasi	5.646.235.000	0	2.007.207.526	7	2.205.002.541	7	4.212.210.067	35	74,6	SR	S
4.02.002.2.03.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	laporan	867.220.000	0	336.318.661	1	341.950.643	1	678.269.304	33,33	78,21	SR	T

4.02.002.2.03.002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Hukum	3	laporan	867.220.000	0	351.496.963	1	383.164.542	1	734.661.505	33,33	84,71	SR	T
4.02.002.2.03.003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	laporan	867.220.000	0	217.592.600	1	374.969.682	1	592.562.282	33,33	68,33	SR	S
4.02.002.2.03.004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	laporan	867.220.000	0	320.635.732	1	288.409.026	1	609.044.758	33,33	70,23	SR	S
4.02.002.2.03.005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	laporan	867.220.000	0	240.870.389	1	346.075.108	1	586.945.497	33,33	67,68	SR	S
4.02.002.2.03.006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	dok	30.861.000	0	8.100.000	0	-	0	8.100.000	0	26,25	SR	SR
4.02.002.2.03.007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	dok	867.220.000	0	167.209.140	1	457.383.540	1	624.592.680	33,33	72,02	SR	S
4.02.002.2.03.008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	dok	412.054.000	0	364.984.041	1	13.050.000	1	378.034.041	100	91,74	ST	ST
4.02.002.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100	%	3.195.339.600	25	682.378.841	25	828.079.862	50	1.510.458.703	50	47,27	SR	SR
4.02.002.2.04.001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR

4.02.002.2.04.002	Bimbingan Teknis DPRD	Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3	dokumen	1.305.822.000	2	551.004.347	0	109.873.462	2	660.877.809	66,67	50,61	S	SR
4.02.002.2.04.003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24	dokumen	298.995.000	6	64.379.494	6	66.826.400	12	131.205.894	50	43,88	SR	SR
4.02.002.2.04.004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	orang	264.172.000	1	14.800.000	0	27.000.000	1	41.800.000	33,33	15,82	SR	SR
4.02.002.2.04.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	orang	274.732.000	6	42.675.000	0	63.000.000	6	105.675.000	100	38,46	ST	SR
4.02.002.2.04.006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	dokumen	1.042.498.600	3	9.520.000	3	561.380.000	6	570.900.000	50	54,76	SR	R
4.02.002.2.04.007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	9.120.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	92	Dokumen	1.762.251.800	32	705.324.977	31	749.574.189	63	1.454.899.166	68,48	82,56	S	T
4.02.002.2.05.001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	laporan	69.370.000	1	24.575.000	1	27.110.950	2	51.685.950	200	74,51	ST	S
4.02.002.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	dokumen	84.987.000	1	16.325.977	0	-	1	16.325.977	100	19,21	ST	SR
4.02.002.2.05.003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil	90	dokumen	1.607.897.600	30	664.424.000	30	722.463.239	60	1.386.887.239	66,67	86,25	S	T

4.02.002.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan Reses Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	3	Dokumen	139.932.453	0	44.371.255	1	43.519.000	1	87.890.255	33,33	62,81	SR	R
4.02.002.2.06.001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.06.002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	laporan	139.932.453	0	44.371.255	1	43.519.000	1	87.890.255	33,33	62,81	SR	R
4.02.002.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	29	Dokumen	1.955.711.200	0	1.051.080.068	7	437.165.338	7	1.488.245.406	24,14	76,1	SR	T
4.02.002.2.08.001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4	Dokumen	472.732.000	1	243.506.262	1	183.174.218	2	426.680.480	50	90,26	SR	T
4.02.002.2.08.002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	laporan	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
4.02.002.2.08.003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen	753.455.000	4	466.757.474	3	152.069.420	7	618.826.894	58,33	82,13	R	T
4.02.002.2.08.004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	704.524.200	3	340.816.332	3	101.921.700	6	442.738.032	50	62,84	SR	R

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2023 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 34,38%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp28.776.748.064 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp49.273.580.052 (empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima puluh dua rupiah) atau sebesar 58,4%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebesar 34,88% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 7 indikator capaian kinerja 0%-50% = 51 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melaksanakan tugas yaitu:

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Upaya Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel
2. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Sekretariat DPRD							Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	Tw 1	Tw 2	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD meningkat	70%	72%	75%	77%	80%	17,23%	17,15%	34,38%
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B (70)	BB	A	A	-	B (63,92)	91,31%
Sasaran 2: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	80%	82%	85%	90%	13%	22%	35%

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan "Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Kinerja DPRD Meningkat", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 34,38% dari target sebesar 72%;
- b. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP" sudah mencapai target, dimana realisasinya adalah nilai B (63,92) sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu nilai B (70), sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 91,31%

- c. Sasaran "Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" belum mencapai target, di mana realisasinya sebesar 35% dari target sebesar 80%

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat melayani segala kegiatan Anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu sifatnya pemberian informasi berkenaan dengan aturan, pelayanan kegiatan rapat-rapat, pelayanan pendampingan kegiatan kunjungan kerja maupun peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu bertujuan menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

Fungsi pertama diwujudkan dalam membentuk dan menetapkan Peraturan daerah bersama sama dengan kepala daerah beserta jajarannya, fungsi kedua yaitu fungsi anggaran merupakan keterpaduan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan suatu kesepakatan bersama di dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan fungsi ketiga diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan produk peraturan perundang undangan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang kesemuanya dijalankan semata-mata sebagai fungsi kontrol pihak legislatif terhadap eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, di dalam menjalankan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah, yang selanjutnya diimplementasikan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah baik dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, dengan kata lain DPRD merupakan partner pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di segala bidang.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai berikut:

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Periode Juni 2023 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami di antaranya:

1. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dari masing-masing Sub Bagian sebagai pelaksana sub kegiatan
2. Pelaksanaan sub kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun
3. Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan ketiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran, belum sepenuhnya dapat mengakomodir matriks kegiatan/agenda yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan DPRD
4. Terbatasnya personil/Sumber Daya Manusia untuk beberapa jenis jabatan fungsional pelaksana, seperti jabatan perisalah

5. Untuk pelaksanaan penyusunan tata tertib DPRD, sampai dengan triwulan 2 belum ada usulan untuk memfasilitasi penyusunan atau perubahan tata tertib DPRD oleh Anggota DPRD Kabupaten Paser dikarenakan syarat penyusunan atau perubahan tata tertib adalah adanya usulan dari Anggota DPRD
6. Untuk pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah masih dalam tahap pembahasan oleh Pansus Raperda DPRD dikarenakan padatnya kegiatan DPRD melaksanakan tugas fungsi lainnya

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota serta pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2023, target tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Tujuan/Sasaran Perubahan Renja 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	
		Renja 2023	Perubahan Renja 2023
1	2	4	5
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD meningkat	72%	72%
Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B (70)	B (70)
Sasaran 2: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	80%	80%

Memperhatikan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada

belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu "PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian yang Mandiri Berbasis Pertanian.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Partisipatif.
3. Penguatan Layanan Infrastruktur dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian sasaran ke-3, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah". Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat DPRD telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Review terhadap rancangan perubahan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya rancangan perubahan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review Terhadap Perubahan RKPd Tahun 2023
Kabupaten Paser

Perubahan RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72	35.360.166.607	A	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	35.357.928.270	44.044.178.270
I	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B (70)	110.664.400	I	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B (70)	110.664.400	110.664.400
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	61.550.300	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	61.550.300	61.550.300
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	2.794.900	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	2.799.680	2.799.680
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	46.319.200	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	46.319.200	46.319.200
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.523.245.398	II	Persentase Tertaksananya Administrasi Keuangan	100%	6.521.007.061	6.523.307.061

Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
	Perangkat Daerah				Perangkat Daerah				
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 orang/12 bulan	6.468.442.798	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.466.204.461	6.468.504.461	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	24.844.200	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.844.200	24.844.200	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	29.958.400	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.958.400	29.958.400	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	280.444.000	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.444.000	572.444.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	280.444.000	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	280.444.000	572.444.000	

Perubahan RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.542.175.100	IV	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1.542.175.100	2.498.122.100	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	31.000.600	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	31.000.600	81.000.060	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	902.984.300	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	902.984.300	1.257.482.700	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 paket	105.720.200	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9 paket	105.720.200	135.720.200	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	36.003.000	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	36.003.000	61.303.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen	153.010.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen	153.010.000	193.010.000	Kekurangan selama 3 bulan
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	32.485.000	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	32.485.000	103.625.000	

Perubahan RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	241.307.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	241.307.000	536.195.000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	39.665.000	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	39.665.000	129.435.600	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	372.430.000	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	372.430.000	639.430.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	-	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	372.430.000	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	53 unit	372.430.000	639.430.000	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	1.628.957.418	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	1.628.957.418	2.138.115.818	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	708.625.200	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	708.625.200	925.393.200	Kekurang an

Perubahan RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				selama 3 bulan
2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	920.332.218	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	920.332.218	1.212.722.618	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.695.912.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara	100%	1.695.912.740	2.845.312.740	
1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.396.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	358.396.500	358.396.500	
2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	280.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	280.125.000	280.125.000	
3	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	14.640.000	14.640.000	
4	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	83 unit	167.088.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	83 unit	167.088.400	232.088.400	Tambah n untuk

Perubahan RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Lainnya	yang Dipelihara			Lainnya	yang Dipelihara				pemeliharaan AC
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 unit	783.430.840	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	783.430.840	1.783.830.840	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan honor BMD • Rehab rumjab sekwan • Rehab ruang kerja ketua • Rehab DPRD • Rehab rumjab Ketua DPRD • Rehab rumjab Wakil Ketua I DPRD • Pemeliharaan gedung kantor
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	256 Unit	92.232.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	256 Unit	92.232.000	176.232.000	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan komputer, printer, dan instalasi listrik

Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)		
VII I	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	21.823.237.151	VII I	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	21.823.237.151	25.782.838.920	
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	360 orang/12 bulan	21.117.182.151	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	21.117.182.151	24.932.333.920	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	30 paket	325.135.000	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	325.135.000	469.585.000	Kekurangan 2 stel PSh dan pakaian berciri khas daerah, dan 30 stel PSR
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	30 orang	380.920.000	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	380.920.000	380.920.000	
IX	Layanan Administrasi DPRD	100%	1.383.100.400	IX	Layanan Administrasi DPRD	100%	1.383.100.400	1.713.700.400	
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	3 laporan	53.351.800	1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	53.351.800	58.351.800	
2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	393.614.800	2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	393.614.800	546.614.800	

Perubahan RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan							
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Konsultasi DPRD	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	36 paket	936.133.800	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	936.133.800	1.108.733.800	Kekurang an belanja riatura Ketua DPRD dan Wakil Ketua I dan II selama 2 bulan
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	18.446.496.600	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	18.446.496.600	28.036.397.000	
		6 Dok				Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok			
		100%				Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%			
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10 dok Perda	2.601.082.000	I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	2.601.082.000	4.201.082.000	

Perubahan RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.200	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	9.259.200	9.259.200	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	1.786.578.400	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	1.786.578.400	2.986.578.400	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.600	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	335.399.600	535.399.600	
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3 dokumen	460.585.600	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	460.585.600	660.585.600	
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 dokumen	9.259.200	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	9.259.200	9.259.200	
II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 rekomendasi	587.796.200	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	587.796.200	1.349.307.000	
1	Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.594.800	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	84.594.800	84.594.800	
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.400	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.140.400	31.140.400	

Perubahan RKP				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)		
	PPAS								
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	161.274.800	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	161.274.800	922.785.600	
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	30.450.400	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	30.450.400	30.450.400	
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	280.335.800	5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	280.335.800	280.335.800	
III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	5.693.243.600	III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	5.693.243.600	9.293.243.600	
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	876.527.000	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	876.527.000	1.476.527.000	
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	876.820.000	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	876.820.000	1.476.820.000	
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Pengawasan	871.968.000	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	871.968.000	1.471.968.000	

Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Kesejahteraan Rakyat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesra			Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	3 laporan	876.579.000	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkonomian	3 laporan	876.579.000	1.476.579.000
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	876.415.000	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	876.415.000	1.476.415.000
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	30.860.800	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	1 dokumen	30.860.800	30.860.800
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	872.020.000	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan Anggaran	3 dokumen	872.020.000	1.472.020.000
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	412.053.800	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	412.053.800	412.053.800

Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
IV Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	4.765.390.000	IV Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	4.765.390.000	6.498.390.000	
1	Orientasi DPRD	0 dokumen	-	1 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 dokumen	-	-	
2	Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.804.620.000	2 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.804.620.000	1.954.620.000	
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	327.784.000	3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	327.784.000	402.784.000	
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	268.936.000	4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	268.936.000	268.936.000	
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.720.000	5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.720.000	274.720.000	
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	2.080.210.000	6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	2.080.210.000	3.588.210.000	
7	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	7 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	9.120.000	

Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	
V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	92 Dok	2.161.734.800	V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	2.161.734.800	2.535.124.000
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1 laporan	69.370.000	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	69.370.000	79.370.000
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dok	84.986.800	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	84.986.800	84.986.800
3	Pelaksanaan Reses	90 dokumen	2.007.378.000	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.007.378.000	2.370.767.600
VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Dok	144.519.000	VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	144.519.000	204.519.000
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	0 Dok	-	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	144.519.000	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	144.519.000	204.519.000
VII	Fasilitasi Tugas DPRD	29 Dok	2.492.731.000	VII	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas	2.492.731.000	3.954.731.000

Perubahan RIKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Alokasi Anggaran Awal (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
					DPRD				
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	972.213.000	1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	972.213.000	1.334.213.000	
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 laporan	24.995.000	2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	24.995.000	24.995.000	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	762.843.000	3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	762.843.000	1.212.843.000	
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	732.680.000	4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	732.680.000	1.382.680.000	
			53.806.663.207				53.804.424.870	70.860.332.439	

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

Dalam hal ini Sekretariat DPRD tidak termasuk ke dalam kelompok SKPD yang menjalankan prioritas pembangunan secara spesifik, di mana tugas dan fungsi yang dijalankan hanya merupakan unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi DPRD, sehingga tidak ada program dan kegiatan yang dijalankan berdasarkan usulan masyarakat melalui forum Musrenbang.

Tabel 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

No	Pokok-Pokok Pikiran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPd 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPd telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.02	Sekretariat DPRD								
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat	72	35.357.928.270	35.360.166.607	152.238.337	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B (70)	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	B (70)	110.664.400	110.664.400	-	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	61.550.300	61.550.300	-	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	2.799.680	2.799.680	-	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	46.319.200	46.319.200	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	6.521.007.061	6.523.245.398	2.238.337	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 orang/12 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	6.466.204.461	6.468.442.798	2.238.337	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat DPRD	24.844.200	24.844.200	-	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat DPRD	29.958.400	29.958.400	-	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	280.444.000	280.444.000	-	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekretariat DPRD	-	-	-	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar kabupaten dan luar provinsi	280.444.000	280.444.000	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Sub Unit Organisasi/Sub Unit / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	Sekretariat DPRD	1.542.175.100	1.542.175.100	-	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	Sekretariat DPRD	31.000.600	31.000.600	-	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	Sekretariat DPRD	902.984.300	902.984.300	-	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	Sekretariat DPRD	105.720.200	105.720.200	-	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	Sekretariat DPRD	36.003.000	36.003.000	-	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	Sekretariat DPRD	153.010.000	153.010.000	-	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	Sekretariat DPRD	32.485.000	32.485.000	-	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	45 laporan	Sekretariat DPRD	241.307.000	241.307.000	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	39.665.000	39.665.000	-	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	100%	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD	372.430.000	372.430.000	-	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	-	-	-	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	372.430.000	372.430.000	-	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor	Sekretariat DPRD	1.628.957.418	1.628.957.418	-	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	708.625.200	708.625.200	-	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	920.332.218	920.332.218	-	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta	100%	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta	Sekretariat DPRD	1.695.912.740	1.695.912.740	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Pemerintahan Daerah	gedung bangunan yang terpelihara		gedung bangunan yang terpelihara					
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Sekretariat DPRD	358.396.500	358.396.500	-
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Sekretariat DPRD	280.125.000	280.125.000	-
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	Sekretariat DPRD	14.640.000	14.640.000	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	Sekretariat DPRD	167.088.400	167.088.400	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Sekretariat DPRD	783.430.840	783.430.840	-
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	256 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	256 Unit	Sekretariat DPRD	92.232.000	92.232.000	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Sub Unit Organisasi/Sub Unit / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	100%	Sekretariat DPRD	21.823.237.151	21.823.237.151	-	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	360 orang/12 bulan	360 orang/12 bulan	Sekretariat DPRD	21.117.182.151	21.117.182.151	-	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	30 paket	Sekretariat DPRD	325.135.000	325.135.000	-	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	30 orang	Luar kabupaten	380.920.000	380.920.000	-	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100%	100%	Sekretariat DPRD	1.383.100.400	1.383.100.400	-	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	3 laporan	3 laporan	Sekretariat DPRD	53.351.800	53.351.800	-	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	20 laporan	Sekretariat DPRD	393.614.800	393.614.800	-	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	36 paket	Sekretariat DPRD	936.133.800	936.133.800	-	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN	Persentase perda yang ditetapkan	100%	100%	Sekretariat DPRD	18.446.496.600	18.446.496.600	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	tepat waktu		tepat waktu					
		Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok	Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6 Dok	Sekretariat DPRD			
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	Sekretariat DPRD			
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan	10 dok Perda	Sekretariat DPRD	2.601.082.000	2.601.082.000	-
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Sekretariat DPRD	9.259.200	9.259.200	-
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	Sekretariat DPRD	1.786.578.400	1.786.578.400	-
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	Sekretariat DPRD	335.399.600	335.399.600	-
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	Sekretariat DPRD	460.585.600	460.585.600	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekretariat DPRD	9.259.200	9.259.200	-	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	5 rekomendasi	Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran	Sekretariat DPRD	587.796.200	587.796.200	-	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	84.594.800	84.594.800	-	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	31.140.400	31.140.400	-	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	161.274.800	161.274.800	-	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	30.450.400	30.450.400	-	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	280.335.800	280.335.800	-	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	20 rekomendasi	Rekomendasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	5.693.243.600	5.693.243.600	-	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan	Sekretariat DPRD	876.527.000	876.527.000	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Hukum							
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	Sekretariat DPRD	876.820.000	876.820.000	-
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	Sekretariat DPRD	871.968.000	871.968.000	-
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	Sekretariat DPRD	876.579.000	876.579.000	-
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	Sekretariat DPRD	876.415.000	876.415.000	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	Sekretariat DPRD	30.860.800	30.860.800	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	Sekretariat DPRD	872.020.000	872.020.000	-
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Sekretariat DPRD	412.053.800	412.053.800	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal	100%	4.765.390.000	4.765.390.000	-	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 dokumen	-	-	-	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.804.620.000	1.804.620.000	-	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	327.784.000	327.784.000	-	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	268.936.000	268.936.000	-	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	274.720.000	274.720.000	-	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dok	2.080.210.000	2.080.210.000	-	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	9.120.000	9.120.000	-	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan	92 Dok	Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan	92 Dok	2.161.734.800	2.161.734.800	-	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 laporan	masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 laporan	Dalam kabupaten	69.370.000	69.370.000	-
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dok	Sekretariat DPRD	84.986.800	84.986.800	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	Dalam kabupaten	2.007.378.000	2.007.378.000	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	3 Dok	Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	3 Dok	Sekretariat DPRD	144.519.000	144.519.000	-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dok	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dok	Sekretariat DPRD	-	-	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	Luar kabupaten dan luar provinsi	144.519.000	144.519.000	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	29 Dok	Dok laporan fasilitasi tugas DPRD	29 Dok	Sekretariat DPRD	2.492.731.000	2.492.731.000	-
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	972.213.000	972.213.000	-
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang	1 laporan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang	1 laporan	Sekretariat DPRD	24.995.000	24.995.000	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Disusun							
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok Sekretariat DPRD	762.843.000	762.843.000	-	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok Sekretariat DPRD	732.680.000	732.680.000	-	
TOTAL ANGGARAN							53.804.424.970	53.806.663.207	2.238.337

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta hasil analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD untuk anggaran perubahan tahun 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai tujuan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen perubahan Renja Tahun 2023 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Tana Paser, 18 Agustus 2023

**SEKRETARIS DPRD,**

M. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Sc
NIP 19780817 200312 1 011